PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
SKPD
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 Desember 2023

Bab I
Pendahuluan

1.1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan SKPD

1.1.1. Maksud penyusunan laporan keuangan SKPD adalah:

a. Menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh SKPD selama periode pelaporan tahun 2023; dan

b. Mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektifitas dan efisiensi SKPD dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

1.1.2. Tujuan penyusunan laporan keuangan SKPD adalah:

a. Menyediakan informasi apakah cara memperoleh pendapatan dan alokasinya telah sesuai dengan target yang ditetapkan dan sesuai peraturan perundang-undangan;

b. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan SKPD serta hasil-hasil yang dicapai;

c. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan SKPD, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama Tahun Anggaran 2023.

1.2 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan SKPD

Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2022 berdasarkan:

a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
e. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
f. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
j. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 59 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;
k. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025;
l. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022;
m. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 14 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
n. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

1.3 Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan SKPD

Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN
Memuat maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah, landasan hukum penyusunan laporan keuangan, dan sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan pemerintah daerah.

BAB II IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN
Memuat ikhtisar realisasi pencapaian kinerja APBD menurut bidang, berupa gambaran realisasi pencapaian efektivitas dan efisiensi serta kendala/hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target.

BAB III PENJELASAN POS-POS PELAPORAN KEUANGAN
Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

BAB IV PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN
Memuat informasi tentang hal-hal non keuangan yang belum diinformasikan dalam bagian manapun dari laporan keuangan, meliputi letak geografis, luas wilayah, penduduk dan informasi relevan lainnya.

BAB V PENUTUP
Memuat uraian penutup berupa kesimpulan-kesimpulan penting dari laporan keuangan Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas.

Bab II
Hasil Pencapaian Kinerja Lembaga SKPD

2.1 Hasil Pencapaian Kinerja Lembaga SKPD

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 Sampai Dengan 31 Desember 2023 dan perkembangannya dibanding Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.1 Realisasi APBD Tahun Anggaran 2023 Sampai dengan 31 Desember 2023

Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
PENDAPATAN	6.378.515.000,00	7.427.114.000,00	116,44
BELANJA	7.1[illegible].490.292,00	25.457.903.776,00	95,79
Surplus (defisit)	(18.098.084.397,00)	(16.010.788.776,00)	88,51

Tabel 2.2 Perkembangan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2022 dan 2023 Sampai dengan 31 Desember 2023

Uraian	2022	2023	%
PENDAPATAN	6.650.390.213,00	7.427.114.000,00	111,68
BELANJA	20.[illegible].014,00	25.457.903.776,00	112,47
Surplus (defisit)	(14.[illegible].801,00)	(16.010.788.776,00)	112,84

Realisasi Pendapatan SKPD Sampai dengan 31 Desember 2023 Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 7.427.114.000,00 atau 116,44% dari target sebesar Rp 6.378.515.000,-

Realisasi Belanja SKPD Sampai dengan 31 Desember 2023 Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 25.457.903.776,00 atau 95,79% dari target sebesar Rp 24.467.199.907,-

2.1.1 Pendapatan

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2023 Sampai dengan 31 Desember 2023 terdiri dari : Retribusi Daerah sebesar 116,46% dan Lain-lain PAD yang sah sebesar 100%. Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Tahun Anggaran 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp 7.427.114.000,- atau [illegible] dari target sebesar Rp 6.378.515.000,-

Tabel 2.3 Anggaran dan Realisasi Pendapatan APBD Sampai dengan 31 Desember 2023 Tahun Anggaran 2023 Perdasarkan Jenis Pendapatan

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Kontribusi (%)
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	6.378.515.000,00	7.427.114.000,00	116,44	
	Pajak Daerah				
	Retribusi Daerah	6.378.515.000,00	7.427.114.000,00	116,46	
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan				
	Lain-lain PAD yang Sah	[illegible]	[illegible]	100,00	
	Pendapatan Daerah	6.378.515.000,00	7.427.114.000,00	116,44	

Tabel 2.4 Perkembangan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2023 dan 2023 Sampai dengan 31 Desember 2023 Perdasarkan Jenis Pendapatan

No	Uraian	2022	2023	%
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	6.650.390.213,00	7.427.114.000,00	111,68
	Pajak Daerah			
	Retribusi Daerah	6.[illegible].201.012,00	7.427.114.000,00	114,22
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			
	Lain-lain PAD yang Sah	1[illegible].198.200,00	0,00	3,92
	Pendapatan Daerah	6.650.390.213,00	7.427.114.000,00	111,68

Bab II
Ikhtisar Pencapaian kinerja keuangan SKPD

2.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan SKPD

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 Sampai Dengan 31 Desember 2023 dan perkembangannya dibanding Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.1 Realisasi APBD Tahun Anggaran 2023 Sampai dengan 31 Desember 2023

Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
PENDAPATAN	6,378,515,000.00	7,427,114,600.00	116.44
BELANJA	24,467,499,297.00	23,437,903,376.00	95.79
Surplus (defisit)	(18,088,984,297.00)	(16,010,788,776.00)	88.51

Tabel 2.2 Perkembangan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2022 dan 2023 Sampai dengan 31 Desember 2023

Uraian	2022	2023	%
PENDAPATAN	6,650,399,213.00	7,427,114,600.00	111.68
BELANJA	20,839,081,614.00	23,437,903,376.00	112.47
Surplus (defisit)	(14,188,682,401.00)	(16,010,788,776.00)	112.84

Realisasi Pendapatan SKPD Sampai dengan 31 Desember 2023 Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 7.427.114.600,- atau 116.44% dari target sebesar Rp 6.378.515.000,-

Realisasi Belanja SKPD Sampai dengan 31 Desember 2023 Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 23.437.903.376,- atau 95,79% dari target sebesar Rp 24.467.499.297,-

2.1.1 Pendapatan

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2023 Sampai dengan 31 Desember 2023 terdiri dari , Retribusi Daerah sebesar 116.46%, dan Lain-lain PAD yang Sah sebesar 100%. Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Tahun Anggaran 2023 Sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp 7.427.114,600,- Gambaran lebih lengkap realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.3 Anggaran dan Realisasi Pendapatan APBD Sampai dengan 31 Desember 2023 Tahun Anggaran 2023 Berdasarkan Jenis Pendapatan

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Kontribusi (%)
1	**Pendapatan Asli Daerah (PAD)**	6,378,515,000.00	7,427,114,600.00	116.44	
	Pajak Daerah				
	Retribusi Daerah	6,372,515,000.00	7,421,114,600.00	116.46	
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan				
	Lain-lain PAD yang Sah	6,000,000.00	6,000,000.00	100.00	
	Pendapatan Daerah	6,378,515,000.00	7,427,114,600.00	116.44	

Tabel 2.4 Perkembangan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2022 dan 2023 Sampai dengan 31 Desember 2023 Berdasarkan Jenis Pendapatan

No	Uraian	2022	2023	%
1	**Pendapatan Asli Daerah (PAD)**	6,650,399,213.00	7,427,114,600.00	111.68
	Pajak Daerah			
	Retribusi Daerah	6,497,201,013.00	7,421,114,600.00	114.22
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			
	Lain-lain PAD yang Sah	153,198,200.00	6,000,000.00	3.92
	Pendapatan Daerah	6,650,399,213.00	7,427,114,600.00	111.68

2.3.2 Belanja

[illegible] Belanja Operasi meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial. Proporsi Belanja Operasi terhadap belanja [illegible] Realisasi Belanja Operasi pada Tahun Anggaran 2023 sampai dengan bulan Desember 2023 [illegible].

Belanja Modal meliputi Belanja Tanah, Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja Gedung dan Bangunan, Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, Belanja Aset Tetap Lainnya, Belanja Modal Aset Lainnya. Proporsi Belanja Modal [illegible] Belanja Modal pada Tahun Anggaran 2023 Sampai dengan 31 Desember 2023 [illegible] Tahun Anggaran 2023 [illegible]. Rincian [illegible] Belanja Modal Tahun Anggaran 2023 [illegible] tabel berikut.

Tabel 2.5 Anggaran dan Realisasi Belanja APBD Tahun Anggaran 2023 Sampai dengan 31 Desember 2023 Berdasarkan Jenis Belanja

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Proporsi
1	Belanja Operasi	22.282.676.175,04	[illegible]	95,30	90,107
	Belanja Pegawai	[illegible]	[illegible]	94,56	
	Belanja Barang dan Jasa	[illegible]	[illegible]	95,57	
	Belanja Hibah	-	-	-	
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	
2	Belanja Modal	2.184.882.801,00	2.155.024.500,00	98,77	9,893
	Belanja Tanah	-	-	-	
	Belanja Peralatan dan Mesin	[illegible]	[illegible]	99,75	
	Belanja Gedung dan Bangunan	[illegible]	[illegible]	99,15	
	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	[illegible]	[illegible]	-	
	Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-	-	
	Belanja Modal Aset Lainnya	-	-	-	
	Jumlah Belanja	[illegible]	[illegible]	[illegible]	

Tabel 2.6 Perbandingan Realisasi Belanja APBD Tahun Anggaran 2022 dan 2023 Sampai dengan 31 Desember 2023 Berdasarkan Jenis Belanja

No	Uraian	2022	2023	(%)
1	Belanja Operasi	19.546.308.157,00	[illegible]	108,61
	Belanja Pegawai	[illegible]	[illegible]	100,17
	Belanja Barang dan Jasa	[illegible]	[illegible]	114,19
	Belanja Hibah	-	-	-
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
2	Belanja Modal	1.192.773.287,00	2.155.024.500,00	180,67
	Belanja Tanah	-		-
	Belanja Peralatan dan Mesin	[illegible]	[illegible]	214,60
	Belanja Gedung dan Bangunan	[illegible]	[illegible]	16,68
	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	[illegible]	-
	Belanja Aset Tetap Lainnya	[illegible]	-	-
	Belanja Modal Aset Lainnya	-	-	-
	Jumlah Belanja	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Tabel 2.7 Anggaran dan Realisasi Belanja APBD Tahun Anggaran 2023 Sampai dengan 31 Desember 2023 Berdasarkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Proporsi
1	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.466.800	[illegible]	100,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	[illegible]	[illegible]	78,48	

2.1.2 Belanja

Belanja Operasi meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial. Proporsi Belanja Operasi terhadap Belanja sebesar 95,50%. Realisasi Belanja Operasi pada Tahun Anggaran 2023 sampai dengan bulan Desember 2023 sebesar Rp 21.279.878.990,-

Belanja Modal meliputi Belanja Tanah, Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi, Belanja Aset Tetap Lainnya, Belanja Modal Aset Lainnya. Proporsi Belanja Modal terhadap Belanja sebesar 98.77%. Realisasi Belanja Modal pada Tahun Anggaran 2023 Sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp 2.158.024.386,- atau sebesar 98.77% dari Anggaran Tahun 2023 sebesar Rp 2.184.882.804 Gambaran lebih lengkap realisasi Belanja Operasi dan Belanja Modal Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.5 Anggaran dan Realisasi Belanja APBD Tahun Anggaran 2023 Sampai dengan 31 Desember 2023 Berdasarkan Jenis Belanja

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Proporsi
1	**Belanja Operasi**	22,282,616,493.00	21,279,878,990.00	95.50	0.9107
	Belanja Pegawai	9,169,087,233.00	8,707,386,990.00	94.96	
	Belanja Barang dan Jasa	13,113,529,260.00	12,572,492,000.00	95.87	
	Belanja Hibah	-	-	-	
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	
2	**Belanja Modal**	2,184,882,804.00	2,158,024,386.00	98.77	0.0893
	Belanja Tanah	-	-	-	
	Belanja Peralatan dan Mesin	2,115,530,304.00	2,089,009,724.00	98.75	
	Belanja Gedung dan Bangunan	30,000,000.00	29,745,000.00	99.15	
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	39,352,500.00	39,269,662.00	-	
	Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-	-	
	Belanja Modal Aset Lainnya	-	-		
	Jumlah Belanja	24,467,499,297.00	23,437,903,376.00	95.79	

Tabel 2.6 Perkembangan Realisasi Belanja APBD Tahun Anggaran 2022 dan 2023 Sampai dengan 31 Desember 2023 Berdasarkan Jenis Belanja

No	Uraian	2022	2023	(%)
1	**Belanja Operasi**	19,646,308,157.00	21,279,878,990.00	108.31
	Belanja Pegawai	8,692,917,655.00	8,707,386,990.00	100.17
	Belanja Barang dan Jasa	10,953,390,502.00	12,572,492,000.00	114.78
	Belanja Hibah	-	-	-
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
2	**Belanja Modal**	1,192,773,457.00	2,158,024,386.00	180.92
	Belanja Tanah	-	-	-
	Belanja Peralatan dan Mesin	964,447,794.00	2,089,009,724.00	216.60
	Belanja Gedung dan Bangunan	178,325,663.00	29,745,000.00	16.68
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	-	39,269,662.00	-
	Belanja Aset Tetap Lainnya	50,000,000.00	-	-
	Belanja Modal Aset Lainnya	-	-	-
	Jumlah Belanja	20,839,081,614.00	23,437,903,376.00	112.47

Tabel 2.7 Anggaran dan Realisasi Belanja APBD Tahun Anggaran 2023 Sampai dengan 31 Desember 2023 Berdasarkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Proporsi
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	11,991,051,883	11,402,478,000	95.09	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	89,561,500	88,631,950	98.96	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3,209,000	3,209,000	100.00	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2,468,500	2,468,500	100.00	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2,468,500	2,468,500	100.00	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2,468,500	2,468,500	100.00	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	2,468,500	2,281,500	92.42	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kineria SKPD	73,378,500	73,302,950	99.90	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3,100,000	2,433,000	78.48	

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**9,171,700,483**	**8,710,000,240**	**94.97**
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9,169,087,233	8,707,386,990	94.96
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	251,250	251,250	100.00
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	202,500	202,500	100.00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	398,500	398,500	100.00
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	685,500	685,500	100.00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	950,500	950,500	100.00
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	125,000	125,000	100.00
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**2,232,500**	**2,232,500**	**100.00**
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	445,000	445,000	100.00
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	455,000	455,000	100.00
Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	455,000	455,000	100.00
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	397,500	397,500	100.00
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	240,000	240,000	100.00
Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	240,000	240,000	100.00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**123,266,500**	**121,982,500**	**98.96**
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	122,782,500	121,498,500	98.95
MonitoringEvaluasidan Penilaian Kinerja Pegawai	484,000	484,000	100.00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**451,354,900**	**427,680,306**	**94.75**
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10,772,500	10,312,500	95.73
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	145,949,650	141,144,000	96.71
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	30,281,750	26,025,000	85.94
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	82,450,000	79,162,000	96.01
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	8,760,000	8,760,000	100.00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	173,141,000	162,276,806	93.73
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**174,921,000**	**168,393,500**	**96.27**
Pengadaan Mebel	45,671,000	45,048,500	98.64
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	129,250,000	123,345,000	95.43
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**1,143,034,000**	**1,136,627,597**	**99.44**
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5,850,000	5,300,000	90.60
Penyediaan Jasa KomunikasiSumber Daya Air dan Listrik	459,900,000	458,620,827	99.72
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	677,284,000	672,706,770	99.32
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**834,981,000**	**746,929,407**	**89.45**
Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	53,896,000	46,994,628	87.20
Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya PemeliharaanPajakdan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	468,208,000	392,765,379	83.89
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	110,377,000	107,493,400	97.39
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	202,500,000	199,676,000	98.61

2	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**12,476,447,414**	**12,035,425,376**	**96.47**	
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	**3,216,707,966**	**3,133,629,035**	**97.42**	
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	1,525,421,166	1,507,616,224	98.83	
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	1,691,286,800	1,626,012,811	96.14	
	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	**5,830,313,100**	**5,504,110,116**	**94.41**	
	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik	546,893,000	432,880,590	79.15	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	5,283,420,100	5,071,229,526	95.98	
	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	**960,099,000**	**947,827,500**	**98.72**	
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	683,893,000	673,803,000	98.52	
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1,200,000	1,050,000	87.50	
	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	50,000,000	50,000,000	100.00	
	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1,440,000	1,440,000	100.00	
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	218,000,000	215,968,500	99.07	
	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	5,566,000	5,566,000	100.00	
	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	**1,375,367,000**	**1,365,377,950**	**99.27**	
	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	240,701,000	240,314,000	99.84	
	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	19,260,000	19,260,000	100.00	
	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	1,115,406,000	1,105,803,950	99.14	
	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	**146,639,660**	**146,637,660**	**100.00**	
	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin	119,839,660	119,839,660	100.00	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	15,070,000	15,068,000	99.99	
	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	11,730,000	11,730,000	100.00	
	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	**507,994,888**	**504,899,915**	**99.39**	
	Pelaksanaan InspeksiAudit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	507,994,888	504,899,915	99.39	
	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	**439,325,800**	**432,943,200**	**98.55**	
	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satuDaerah Kabupaten/Kota	439,325,800	432,943,200	98.55	
	Jumlah Belanja	**24,467,499,297**	**23,437,903,376**	**95.79**	

Tabel 2.8 Perkembangan Realisasi Belanja APBD Tahun Anggaran 2022 dan 2023 Berdasarkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

No	Uraian	2022	2023	(%)
1	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG**	190,000,000	-	-
	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kesultanan dan Kadipaten	190,000,000	-	-
	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis (Dinas Perhubungan)	190,000,000	-	-
2	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	11,089,031,699	11,402,478,000	102.83
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	88,807,100	88,631,950	99.80
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2,533,500	3,209,000	126.66
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4,920,400	2,468,500	50.17
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kineria SKPD	81,200,800	2,468,500	3.04
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	-	2,468,500	-
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	-	2,281,500	-
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kineria SKPD	-	73,302,950	-
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	152,400	2,433,000	1,596.46
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8,695,650,555	8,710,000,240	100.17
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8,692,917,655	8,707,386,990	100.17
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	301,500	-	-
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Penguiian/Verifikasi Keuangan SKPD	346,500	251,250	72.51
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	200,500	202,500	101.00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	408,500	398,500	97.55
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	698,400	685,500	98.15
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	714,500	950,500	133.03
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	63,000	125,000	198.41
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	2,232,500	-
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	-	445,000	-
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	-	455,000	-
	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	-	455,000	-
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	397,500	-
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	240,000	-
	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	-	240,000	-
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	156,334,000	121,982,500	78.03
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	156,334,000	121,498,500	77.72
	MonitoringEvaluasidan Penilaian Kinerja Pegawai	-	484,000	-
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	351,400,424	427,680,306	121.71
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8,011,000	10,312,500	128.73
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	145,739,724	141,144,000	96.85
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	-	26,025,000	-
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	55,679,000	79,162,000	142.18
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3,840,000	8,760,000	228.13
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	138,130,700	162,276,806	117.48

	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**200,963,300**	**168,393,500**	**83.79**
	Pengadaan Mebel	-	45,048,500	-
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	200,963,300	123,345,000	61.38
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**981,078,048**	**1,136,627,597**	**115.85**
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3,400,000	5,300,000	155.88
	Penyediaan Jasa KomunikasiSumber Daya Air dan Listrik	404,049,499	458,620,827	113.51
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	573,628,549	672,706,770	117.27
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**614,798,272**	**746,929,407**	**121.49**
	Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	41,243,650	46,994,628	113.94
	Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya PemeliharaanPajakdan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	302,669,672	392,765,379	129.77
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	77,645,950	107,493,400	138.44
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	193,239,000	199,676,000	103.33
3	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**9,560,049,915**	**12,035,425,376**	**125.89**
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	**2,295,787,662**	**3,133,629,035**	**136.49**
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	787,821,494	1,507,616,224	191.37
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	1,507,966,168	1,626,012,811	107.83
	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	**4,758,618,950**	**5,504,110,116**	**115.67**
	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik	367,713,800	432,880,590	117.72
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	4,390,905,150	5,071,229,526	115.49
	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	**635,536,507**	**947,827,500**	**149.14**
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	464,131,507	673,803,000	145.18
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	600,000	1,050,000	175.00
	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	50,000,000	50,000,000	100.00
	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1,400,000	1,440,000	102.86
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	114,680,000	215,968,500	188.32
	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	4,725,000	5,566,000	117.80
	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	**1,206,166,552**	**1,365,377,950**	**113.20**
	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	232,584,148	240,314,000	103.32
	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	22,050,000	19,260,000	87.35
	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	951,532,404	1,105,803,950	116.21

	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	**207,395,500**	**146,637,660**	**70.70**
	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin	180,815,500	119,839,660	66.28
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	15,180,000	15,068,000	99.26
	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	11,400,000	11,730,000	102.89
	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	**271,399,432**	**504,899,915**	**186.04**
	Pelaksanaan InspeksiAudit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	271,399,432	504,899,915	186.04
	Pelaksanaan InspeksiAudit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	-	-	-
	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	**185,145,312**	**432,943,200**	**233.84**
	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satuDaerah Kabupaten/Kota	185,145,312	432,943,200	233.84
		20,839,081,614	**23,437,903,376**	**112.47**

2.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

Realisasi Belanja Operasional sebesar 95,50% karena :

- Belanja Gaji dan Tunjangan tidak sesuai dengan target karena ada pegawai yang mutasi keluar, pensiun dan tunjangan anak berkurang
- Belanja Bahan Bakar dan Pelumas tidak sesuai target karena harga bbm yang fluktuatif

Realisasi Belanja Modal sebesar 98,77%

ab III
laporan keuangan SKPD

3. Rincian dari penjelasan dari masing-masing pos-pos pelaporan keuangan SKPD

3.1	**Pendapatan - LRA**	**Realisasi 2023 (Rp)**	**Realisasi 2022 (Rp)**
	Pendapatan	**7,427,114,600.00**	**6,650,399,213.00**
	Pendapatan Asli Daerah	**7,427,114,600.00**	**6,650,399,213.00**
	Hasil Retribusi Daerah	**7,421,114,600.00**	**6,497,201,013.00**
	1 Retribusi Jasa Umum	**6,509,624,000.00**	**5,951,245,001.00**
	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	5,776,414,000.00	5,249,775,001.00
	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	733,210,000.00	701,470,000.00
	2 Retribusi Jasa Usaha	**911,490,600.00**	**545,956,012.00**
	Retribusi Penyewaan Bangunan	411,157,600.00	137,300,000.00
	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	500,333,000.00	408,656,012.00
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	**6,000,000.00**	**153,198,200.00**
	1 Hasil Pemanfaat BMD yang Tidak Dipisahkan	**6,000,000.00**	**6,000,000.00**
	Hasil Sewa BMD	6,000,000.00	6,000,000.00
	2 Pendapatan Denda Retribusi Daerah	**-**	**147,198,200.00**
	Pendapatan Denda Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	-	147,198,200.00

Penjelasan :

1. Retribusi Jasa Umum terdiri dari :

a. Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum terealisasi sebesar Rp 5.776.414.000,- atau 113,26% dari target
b. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor terealisasi sebesar Rp 733.210.000,- atau 103,06% dari target

2. Retribusi Jasa Usaha terdiri dari :

a. Retribusi Penyewaan Bangunan sebesar Rp411.157.600,- atau 543,86% dari target
b. Retribusi Tempat Khusus Parkir terealisasi sebesar Rp 500.333.000,- atau 103,06% dari target

3. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah terdiri dari :

a. Pendapatan dari Barang Milik Daerah terealisasi sebesar Rp.6.000.000.00,- atau 100% dari target

3.2	Belanja	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
	BELANJA	23,437,903,376.00	20,839,081,614.00
a.	BELANJA OPERASI	21,279,878,990.00	19,646,308,157.00
	Belanja Pegawai	8,707,386,990.00	8,692,917,655.00
	Belanja Barang dan Jasa	12,572,492,000.00	10,953,390,502.00
b.	BELANJA MODAL	2,158,024,386.00	1,192,773,457.00
	Belanja Tanah	-	-
	Belanja Peralatan dan Mesin	2,089,009,724.00	964,447,794.00
	Belanja Gedung dan Bangunan	29,745,000.00	178,325,663.00
	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	39,269,662.00	-
	Belanja Aset Tetap Lainnya	-	50,000,000.00
	Belanja Aset Lainnya	-	-

Penjelasan :

Belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa, TA 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 terealisir sebesar Rp 21.279.878.990,- atau 95,50% dari target.

Belanja Modal TA 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 terealisir sebesar Rp 2.158.024.386,- atau 98,77% dari target. Realisasi Belanja Modal tersebut terdiri dari :

1. Belanja Tanah	-
2. Belanja Peralatan dan Mesin	2,089,009,724.00
3. Belanja Gedung dan Bangunan	29,745,000.00
4. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	39,269,662.00
5. Belanja Aktiva Tetap Lainnya	-
6. Bangunan dalam Pengerjaan	-
7. Aset Lainnya	

3.3	Pendapatan - LO	Jumlah Pendapatan-LO Per 31 Desember 2023 (Rp)	Jumlah Pendapatan-LO Per 31 Desember 2022 (Rp)
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO	7,427,114,600.00	6,650,399,213.00
	Pendapatan Pajak Daerah - LO	-	-
	Pendapatan Retribusi Daerah - LO	7,421,114,600.00	6,497,201,013.00
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	-	-
	Lain-lain PAD Yang Sah	6,000,000.00	153,198,200.00
	PENDAPATAN TRANSFER - LO	-	-
	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO	-	
	SURPLUS NON OPERASIONAL - LO	-	-
	PENDAPATAN LUAR BIASA	-	-
	Jumlah Pendapatan	7,427,114,600.00	6,650,399,213.00

Penjelasan :

Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta pada sampai dengan 31 Desember 2023 mempunyai Pendapatan Retribusi Daerah realisasinya adalah Rp.7.421.114.600,- dan Lain - Lain PAD Yang Sah realisasinya adalah Rp 6.000.000,-

3.4	Beban	Jumlah Pendapatan-LO Per 31 Desember 2023 (Rp)	Jumlah Pendapatan-LO Per 31 Desember 2022 (Rp)
1	BEI BEBAN OPERASI - LO	23,793,125,064.56	21,042,905,677.05
	Beban Pegawai - LO	8,707,386,990.00	8,692,917,655.00
	Beban Barang dan Jasa	12,835,974,466.00	11,003,233,700.00
	Beban Bunga		
	Beban Subsidi		
	Beban Hibah		
	Beban Bantuan Sosial		
	Beb: Beban Penyusutan dan Amortisasi	2,249,763,608.56	1,346,754,322.05
	Beb: Beban Penyisihan Piutang		
	Beban Lain-lain		
2	BEBAN TRANSFER	-	-
3	DEI DEFISIT NON OPERASIONAL	-	-
4	BEI BEBAN LUAR BIASA	-	-
	Jumlah Beban	23,793,125,064.56	21,042,905,677.05

Penjelasan realisasi :

3.5 Aset	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
ASET LANCAR	**616,872,656.00**	**1,312,447,451.00**
Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-
Piutang Retribusi Jasa Usaha	191,542,388.00	191,542,388.00
Penyisihan Piutang Pendapatan	(191,542,388.00)	(191,542,388.00)
Persediaan (Barang Pakai Habis)	616,872,656.00	828,003,612.00
Bahan Bangunan dan Konstruksi	5,178,250.00	5,394,250.00
Bahan Bakar dan Pelumas	2,828,400.00	1,815,000.00
Bahan Baku	1,075,000.00	1,174,000.00
Isi Tabung Pemadam Kebakaran	1,990,000.00	-
Isi Tabung Gas	180,000.00	-
Alat Tulis Kantor	22,707,810.00	33,210,190.00
Kertas dan Cover	7,550,000.00	4,680,000.00
Bahan Cetak	375,500,860.00	430,860,185.00
Benda Pos	2,350,000.00	-
Bahan Komputer	11,498,214.00	7,310,214.00
Perabot Kantor	9,508,633.00	9,977,317.00
Alat Listrik	4,055,200.00	7,674,500.00
Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lai	172,450,289.00	325,907,956.00
ASET TETAP	**17,050,862,943.54**	**22,076,922,574.96**
Peralatan dan Mesin	39,411,417,048.60	39,549,877,658.92
Gedung dan Bangunan	15,466,865,934.24	16,686,952,934.24
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	325,757,548.00	464,641,320.01
Aset Tetap Lainnya	8,283,100.00	52,881,670.00
Akumulasi Penyusutan	(38,161,460,685.30)	(34,677,431,008.21)
ASET TETAP LAINNYA	**8,283,100.00**	**52,881,670.00**
Bahan Perpustakaan	8,283,100.00	8,283,100.00
Tanaman	-	44,598,570.00
ASET LAINNYA	**4,302,993,380.00**	**4,090,974,100.00**
Kajian	4,042,838,380.00	3,830,819,100.00
Software	260,155,000.00	260,155,000.00
Aset Rusak Berat/Usang	-	

Penjelasan :
Uraikan per Rincian Objek Aset, beri penjelasan penambahan dan pengurangan Aset selama tahun berjalan.

Penambahan Aset Tetap sampai dengan 31 Desember tahun 2023 yang berasal dari belanja modal dan hibah terdiri dari :

Tanah	-
Peralatan dan Mesin	2,089,009,724.00
Bangunan Gedung	29,745,000.00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	39,269,662.00
Aset Tetap Lainnya	-
Aktiva Lainnya	-
Bangunan dalam Pengerjaan	-
Jumlah	2,158,024,386.00

Penambahan aset tetap sampai dengan 31 Desember tahun 2023 adalah Rp 2.158.024.386,- yang terdiri dari :

Realisasi Belanja Modal	2,158,024,386.00	
Penambahan	-	
Pengurangan		
Penghapusan dari BPKAD		**Nilai**
		-
		-
		-

3.6	Kewajiban	31 Desember 2022 (Rp)	Penambahan	Pengurangan	31 Desember 2023 (Rp)
	Utang Belanja Barang Pakai Habis - Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	-	-	-	-
	Utang Belanja Jasa Kantor - Jasa Tenaga Perhubungan	-	-	-	-
	Utang Belanja Jasa Kantor - Tagihan Telepon	149,832.00	122,522.00	149,832.00	122,522.00
	Utang Belanja Jasa Kantor - Tagihan Listrik	38,022,450.00	42,576,170.00	38,022,450.00	42,576,170.00
	Utang Belanja Jasa Kantor - Jasa Yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain (Bagi Hasil Restribusi Parkir)	167,494,000.00	215,319,100.00	167,494,000.00	215,319,100.00
	Utang Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	-	-	-	-
	Jumlah Kewajiban	**205,666,282.00**	**258,017,792.00**	**205,666,282.00**	**258,017,792.00**

Penjelasan :

3.7	Ekuitas	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
	Ekuitas Awal	23,041,445,154.95	23,041,445,154.95
	RK PPKD	16,010,788,776.00	
	Surplus/Defisit-LO	(16,366,010,464.56)	-
	Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	-	-
	Ekuitas Mutasi Aset Tetap	(1,318,569,614.60)	-
	Ekuitas Mutasi Akumulasi Penyusutan	(3,741,110,720.94)	
	Ekuitas Mutasi Aset Lainnya	212,019,280.00	
	Ekuitas Mutasi Amortisasi	(106,009,639.97)	
	Dampak Kumulatif Perubahan	-	
	Kebijakan/Kesalahan Mendasar:		-
	Koreksi Nilai Persediaan		
	Selisih Revaluasi Aset Tetap		
	Lain-lain		
	Ekuitas Akhir	17,732,552,770.88	23,041,445,154.95

Penjelasan :
Uraikan per Rincian Objek Ekuitas, beri penjelasan penambahan dan pengurangan Ekuitas selama tahun berjalan.

Bab IV
Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan SKPD

4.1 Struktur Organisasi

(1) Susunan organisasi Dinas, terdiri atas:
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat, terdiri atas:
    1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
    2. Subbagian Keuangan; dan
    3. Subbagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan.
c. Bidang Lalu Lintas, terdiri atas:
    1. Kelompok Substansi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;
    2. Seksi Sarana Prasarana Lalu Lintas; dan
    3. Seksi Pengendalian Dampak Lalu Lintas.
d. Bidang Angkutan Jalan dan Keselamatan Lalu Lintas, terdiri atas:
    1. Seksi Angkutan Jalan;
    2. Kelompok Substansi Bimbingan Keselamatan Lalu Lintas; dan
    3. Seksi Pengendalian Operasional.
e. Bidang Perparkiran, terdiri atas:
    1. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Parkir; dan
    2. Seksi Retribusi Parkir.
f. Unit pelaksana teknis; dan
g. Jabatan fungsional.

4.2 Tugas Pokok dan Fungsi

a. Kepala Dinas;

Dinas mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan, memiliki fungsi :
a. pengoordinasian perencanaan penyelenggaraan urusan di bidang perhubungan;
b. pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis bidang perhubungan;
c. pengoordinasian tugas dan fungsi unsur organisasi Dinas;
d. pengoordinasian penyelenggaraan pengelolaan lalu lintas;
e. pengoordinasian penyelenggaraan pengelolaan angkutan jalan dan keselamatan lalu lintas;
f. pengoordinasian penyelenggaraan perparkiran;
g. pengoordinasian penyelenggaraan rekomendasi perizinan di bidang perhubungan;
h. pembinaan dan pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi UPT dinas
i. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan kesekretariatan Dinas;
j. pembinaan dan pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi kelompok jabatan fungsional pada Dinas;
k. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan Dinas;
l. pengoordinasian pengelolaan data dan informasi Dinas;
m. pengoordinasian penyelenggaraan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Dinas;
n. pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
o. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dinas; dan
p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dinas

b. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan kesekretariatan Dinas, mempunyai fungsi :

a. pengoordinasian perencanaan program kerja pada Sekretariat;
b. pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis kesekretariatan Dinas;
c. pengoordinasian pelaksanaan program kerja pada Sekretariat;
d. membantu Kepala Dinas dalam pengoordinasian program kegiatan bidang dan seksi;
e. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan administrasi umum dan kepegawaian Dinas;
f. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pengelolaan keuangan dan aset Dinas;
g. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Dinas;
h. pengoordinasian fasilitasi pengelolaan data dan informasi Dinas;
i. pengoordinasian pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Dinas;
j. pengoordinasian pelaksanaan pengelolaan kearsipan pada Sekretariat;
k. pengoordinasian fasilitasi kelompok jabatan fungsional Dinas;
l. pengoordinasian fasilitasi pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan Dinas;
m. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada Sekretariat;
n. pengoordinasian fasilitasi tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
o. pengoordinasian pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Sekretariat;
p. pengoordinasian penyiapan bahan dan penyusunan pelaporan Dinas;
q. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan program kerja pada Sekretariat; dan
r. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dinas

c. Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan fungsi penunjang di bidang administrasi umum dan kepegawaian Dinas, memiliki fungsi :

a. penyusunan perencanaan kegiatan pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait administrasi umum dan kepegawaian;
c. pengelolaan administrasi perkantoran dan persuratan Dinas;
d. penyelenggaraan kerumahtanggaan dan pengelolaan aset Dinas;
e. pelaksanaan fasilitasi kelompok jabatan fungsional Dinas;
f. pengelolaan administrasi kepegawaian Dinas;
g. penyiapan bahan pengembangan kapasitas aparatur sipil negara di lingkungan Dinas;
h. pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Dinas;
i. pelaksanaan pengelolaan kearsipan pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
j. fasilitasi pelaksanaan kehumasan, keprotokolan, publikasi dan dokumentasi Dinas;
k. fasilitasi penyusunan dan pelaporan ketatalaksanaan, yang meliputi proses bisnis, standar operasional prosedur, standar pelayanan publik, dan survei kepuasan masyarakat Dinas;
l. fasilitasi dan koordinasi tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Dinas;
m. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
n. pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
o. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan pada Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan

d. Subbagian Keuangan

Subbagian Keuangan mempunyai tugas perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan fungsi penunjang di bidang pengelolaan keuangan Dinas, memiliki fungsi :

a. penyusunan perencanaan kegiatan pada Subbagian Keuangan;
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan keuangan;
c. penatausahaan keuangan Dinas;
d. pengelolaan perbendaharaan Dinas;
e. pelaksanaan akuntansi keuangan dan aset Dinas;
f. pelaksanaan verifikasi pertanggungjawaban keuangan Dinas;
g. penyusunan pertanggungjawaban keuangan Dinas;
h. pengelolaan kearsipan pada Subbagian Keuangan;
i. pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Subbagian Keuangan;
j. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Subbagian Keuangan;
k. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan pada Subbagian Keuangan; dan
l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Dinas

e. Subbagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan

Subbagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan fungsi penunjang di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan Dinas, memiliki fungsi :

a. penyusunan perencanaan kegiatan pada Subbagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan;
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
c. fasilitasi, koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan data dan informasi Dinas;
d. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi penyusunan perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan Dinas;
e. fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas dan budaya pemerintahan Dinas;
f. pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Subbagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan;
g. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Subbagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan;
h. pengelolaan kearsipan pada Subbagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan;
i. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan pada Subbagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan; dan
j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas

f. Bidang Lalu Lintas

Bidang Lalu Lintas mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengelolaan lalu lintas, memiliki fungsi :

a. pengoordinasian perencanaan program kerja pada Bidang Lalu Lintas;
b. pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis terkait pengelolaan lalu lintas;
c. pengoordinasian pelaksanaan program kerja pada Bidang Lalu Lintas;
d. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas;
e. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan sarana prasarana lalu lintas;
f. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pengendalian dampak lalu lintas;
g. pengoordinasian pengelolaan data dan informasi pada Bidang Lalu Lintas;
h. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Bidang Lalu Lintas;
i. pengoordinasian pengelolaan kearsipan pada Bidang Lalu Lintas;
j. pengoordinasian pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Bidang Lalu Lintas;
k. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan program kerja pada Bidang Lalu Lintas; dan
l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Dinas.

g. Kelompok Substansi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
Kelompok Substansi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pemberian bimbingan kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas, memiliki fungsi :
a. penyusunan perencanaan kegiatan;
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait manajemen dan rekayasa lalu lintas;
c. pelaksanaan penataan manajemen dan rekayasa lalu lintas;
d. pelaksanaan uji coba dan sosialisasi manajemen dan rekayasa lalu lintas;
e. pelaksanaan pengaturan lalu lintas melalui Area Traffict Control System;
f. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;
g. pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada;
h. pelaksanaan pengelolaan kearsipan;
i. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
j. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan; dan
k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang Dinas.

h. Seksi Sarana Prasarana Lalu Lintas
Seksi Sarana Prasarana Lalu Lintas mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pemberian bimbingan melalui kegiatan pengelolaan sarana prasarana lalu lintas, memiliki fungsi :
a. penyusunan perencanaan kegiatan pada Seksi Sarana Prasarana Lalu Lintas;
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait pengelolaan sarana prasarana lalu lintas;
c. pelaksanaan pengelolaan sarana prasarana lalu lintas;
d. penyusunan rencana dan penentuan prioritas sarana prasarana lalu lintas jalan di jaringan jalan kota;
e. penyediaan, pemasangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lalu lintas jalan di jaringan jalan kota;
f. pelaksanaan pengawasan dan pemantauan sarana prasarana lalu lintas jalan di jaringan jalan kota;
g. pelaksanaan rehabilitasi dan pemeliharaan perlengkapan jalan;
h. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pada Seksi Sarana Prasarana Lalu Lintas;
i. pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan Seksi Sarana Prasarana Lalu Lintas;
j. pelaksanaan pengelolaan kearsipan Seksi Sarana Prasarana Lalu Lintas;
k. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Seksi Sarana Prasarana Lalu Lintas;
l. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan pada Seksi Sarana Prasarana Lalu Lintas; dan
m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas.

i. Seksi Pengendalian Dampak Lalu Lintas
Seksi Pengendalian Dampak Lalu Lintas mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pemberian bimbingan kegiatan pengendalian dampak lalu lintas.
a. penyusunan perencanaan kegiatan pada Seksi Pengendalian Dampak Lalu Lintas;
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait pengendalian dampak lalu lintas;
c. pelaksanaan pengendalian dampak lalu lintas;
d. pelaksanaan penyiapan bahan penetapan kebijakan tata kelola analisa dampak lalu lintas;
e. pelaksanaan penyiapan bahan, koordinasi dan sinkronisasi pemberian rekomendasi analisa dampak lalu lintas;
f. pengawasan pelaksanaan rekomendasi analisa dampak lalu lintas;

g. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pada Seksi Pengendalian Dampak Lalu Lintas;
h. pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Seksi Pengendalian Dampak Lalu Lintas;
i. pelaksanaan pengelolaan kearsipan pada Seksi Pengendalian Dampak Lalu Lintas;
j. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Seksi Pengendalian Dampak Lalu Lintas;
k. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pengendalian Dampak Lalu Lintas; dan
l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Dinas.

j. Bidang Angkutan Jalan dan Keselamatan Lalu Lintas
Bidang Angkutan Jalan dan Keselamatan Lalu Lintas mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengelolaan angkutan jalan dan keselamatan lalu lintas, memiliki fungsi :
a. pengoordinasian perencanaan program kerja pada Bidang Angkutan Jalan dan Keselamatan Lalu Lintas;
b. pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis terkait pengelolaan angkutan jalan dan keselamatan lalu lintas;
c. pengoordinasian pelaksanaan program kerja pada Bidang Angkutan Jalan dan Keselamatan Lalu Lintas;
d. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pengelolaan angkutan jalan;
e. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan bimbingan keselamatan lalu lintas;
f. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pengendalian operasional;
g. pengoordinasian pelayanan perizinan dan/atau nonperizinan di bidang angkutan jalan;
h. pengoordinasian pengelolaan data dan informasi pada Bidang Angkutan Jalan dan Keselamatan Lalu Lintas;
i. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Bidang Angkutan Jalan dan Keselamatan Lalu Lintas;
j. pengoordinasian pengelolaan kearsipan pada Bidang Angkutan Jalan dan Keselamatan Lalu Lintas
k. pengoordinasian pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Bidang Angkutan Jalan dan Keselamatan Lalu Lintas;
l. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi serta penyusunan laporan program kerja pada Bidang Angkutan Jalan dan Keselamatan Lalu Lintas; dan
m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas Dinas

k. Seksi Angkutan Jalan
Seksi Angkutan Jalan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan kegiatan pembinaan angkutan jalan, memiliki fungsi :
a. penyusunan perencanaan kegiatan pada Seksi Angkutan Jalan;
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan angkutan jalan;
c. pelaksanaan pembinaan penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam satu daerah;
d. pelaksanaan pembinaan organisasi angkutan darat, agen tiket angkutan dan sumber daya manusia yang bergerak di bidang angkutan jalan;
e. pelaksanaan penyiapan bahan rekomendasi perizinan angkutan jalan;
f. pelaksanaan pengadaan, pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana angkutan umum;
g. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pada Seksi Angkutan Jalan;
h. pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Seksi Angkutan Jalan;
i. pelaksanaan pengelolaan kearsipan pada Seksi Angkutan Jalan;
j. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Seksi Angkutan Jalan;
k. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Angkutan Jalan; dan
l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Dinas.

l. Kelompok Substansi Bimbingan Keselamatan Lalu Lintas
Kelompok Substansi Bimbingan Keselamatan Lalu Lintas mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan melalui kegiatan bimbingan keselamatan lalu lintas, memiliki fungsi :
a. penyusunan perencanaan kegiatan;
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bimbingan keselamatan lalu lintas;
c. pelaksanaan bimbingan keselamatan lalu lintas;
d. pelaksanaan inspeksi, audit dan pemantauan pemenuhan persyaratan penyelenggaraan kompetensi pengemudi kendaraan bermotor;
e. pelaksanaan inspeksi, audit dan pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum;
f. pelaksanaan edukasi keselamatan lalu lintas;
g. pelaksanaan pengelolaan taman keselamatan lalu lintas;
h. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi Bimbingan Keselamatan Lalu Lintas;
i. pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan;
j. pelaksanaan pengelolaan kearsipan;
k. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
l. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan; dan
m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Dinas.

m. Seksi Pengendalian Operasional
Seksi Pengendalian Operasional mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan melalui kegiatan pengendalian operasional, memiliki fungsi :
a. penyusunan perencanaan kegiatan Seksi Pengendalian Operasional;
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengendalian operasional;
c. pelaksanaan pengendalian operasional;
d. pelaksanaan pengawalan tamu Pemerintah Daerah dan pengaturan kelancaran lalu lintas pada acara tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah;
e. pelaksanaan patroli, pengendalian, pengawasan dan penegakan Peraturan Daerah di bidang perhubungan dan pengaturan lalu lintas;
f. pelaksanaan operasi terpadu penegakan hukum bidang perhubungan;
g. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pengendalian operasional;
h. pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan Seksi Pengendalian Operasional;
i. pelaksanaan pengelolaan kearsipan Seksi Pengendalian Operasional;
j. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Seksi Pengendalian Operasional;
k. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pengendalian Operasional; dan
l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Dinas.

n. Bidang Perparkiran
Bidang Perparkiran mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi penyelenggaraan perparkiran
a. pengoordinasian perencanaan program kerja pada Bidang Perparkiran;
b. pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis terkait perparkiran;
c. pengoordinasian pelaksanaan program kerja pada Bidang Perparkiran;
d. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pembinaan dan pengawasan parkir;
e. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan perizinan dan retribusi parkir;
f. pengoordinasian pengelolaan data dan informasi Bidang Perparkiran;
g. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Bidang Perparkiran;
h. pengoordinasian pengelolaan kearsipan Bidang Perparkiran;
i. pengoordinasian pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Bidang Perparkiran;
j. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan program kerja Bidang Perparkiran; dan
k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas Dinas.

o. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Parkir

Seksi Pembinaan dan Pengawasan Perparkiran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan kegiatan pembinaan dan pengawasan perparkiran, memiliki fungsi :

a. penyusunan perencanaan kegiatan Seksi Pembinaan dan Pengawasan Perparkiran;

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait pembinaan dan pengawasan perparkiran;

c. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan perparkiran;

d. pelaksanaan pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan perparkiran;

e. pelaksanaan pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana parkir di tepi jalan umum dan di tempat khusus parkir pemerintah;

f. pelaksanaan penyiapan bahan rekomendasi teknis penerbitan surat izin juru parkir;

g. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja juru parkir;

h. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi perparkiran;

i. pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan Seksi Pembinaan dan Pengawasan Perparkiran;

j. pelaksanaan pengelolaan kearsipan Seksi Pembinaan dan Pengawasan Perparkiran;

k. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Seksi Pembinaan dan Pengawasan Perparkiran;

l. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pembinaan dan Pengawasan Perparkiran; dan

m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Dinas.

p. Seksi Perizinan dan Retribusi Parkir

Seksi Perizinan dan Retribusi Parkir mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan melalui kegiatan perizinan dan pengelolaan retribusi parkir.

a. penyusunan perencanaan kegiatan Seksi Perizinan Dan Retribusi Parkir;

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait perizinan dan retribusi parkir;

c. pelaksanaan penyiapan bahan rekomendasi perizinan dan pengelolaan retribusi parkir;

d. pelaksanaan penyiapan bahan rekomendasi perizinan penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir;

e. pelaksanaan teknis operasional pemungutan retribusi parkir;

f. pelaksanaan pengadaan sarana pendukung petugas parkir dan juru parkir;

g. pelaksanaan pengadaan Surat Ketetapan Retribusi Daerah perparkiran;

h. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi retribusi parkir;

i. pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Seksi Perizinan dan Retribusi Parkir;

j. pelaksanaan pengelolaan kearsipan Seksi Perizinan dan Retribusi Parkir;

k. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Seksi Perizinan dan Retribusi Parkir;

l. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Perizinan dan Retribusi Parkir; dan

m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Dinas.

Bab V
Penutup

Dari uraian Laporan Keuangan SKPD Tahun Anggaran 2023 pada bab terdahulu dapat disimpulkan sebagai berikut:

5.1 Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

5.1.1 Pendapatan

5.1.1.a Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah APBD Tahun Anggaran 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 terealisasi sebesar Rp 7.427.114.600,-atau 116,46% dari target Rp 6.378.515.000,- yang terdiri dari :

1) Hasil Retribusi Daerah sebesar Rp 7.421.114.600,- atau 116,46% dari target;
2) Lain-lain PAD yang sah sebesar Rp 6.000.000,- atau 100% dari target.

5.1.2 Belanja

Realisasi belanja APBD Tahun Anggaran 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp23.437.903.376,- atau 95,79% dari anggaran yang terdiri dari Belanja Operasi dan Belanja Modal.

5.1.2.a. Belanja Operasi

Realisasi Belanja Operasional sebesar Rp 21.279.878.990,- atau sebesar 95,50% dari anggaran. Belanja operasi meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial.

Belanja Pegawai yang dianggarkan sebesar Rp 9.169.087.233,- terealisasi sebesar Rp 8.707.386.990,- atau 94,96% dari anggaran. Belanja Barang dan Jasa dianggarkan sebesar Rp 13.113.529.260,- terealisasi sebesar Rp 12.572.492.000- atau sebesar 95,87% dari anggaran.

5.1.2.b. Belanja Modal

Belanja Modal terealisasi sebesar Rp 2.158.024.386.000,- atau 98,77% dari anggaran.

Belanja Modal meliputi Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan, Belanja Modal Aset Tetap Lainnya, dan Belanja Modal Lainnya.

5.2 Neraca

5.2.1 Aset

Neraca per 31 Desember 2023 menunjukkan nilai Aset sebesar Rp 17.990.570.562,88,- terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp616.872.656,- Aset Tetap sebesar Rp 17.050.862.943,54,-dan Aset Lainnya sebesar Rp 322.834.963,34,-.

5.2.2 Kewajiban

Neraca per 31 Desember 2023 menunjukkan Kewajiban sebesar Rp 258.017.792,- yang merupakan Kewajiban Jangka Pendek.

5.2.3 Ekuitas

Neraca per 31 Desember 2023 menunjukkan Ekuitas sebesar Rp17.732.552.770,88

5.3 Laporan Operasional

5.3.1 Pendapatan-LO

Jumlah Pendapatan-LO per 31 Desember 2023 sebesar Rp 7.427.114.600,- yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah-LO sebesar Rp 7.427.114.600,-

5.3.2 Beban-LO

Jumlah Beban-LO per 31 Desember 2023 sebesar Rp 23.793.125.064,56,- yang terdiri dari Beban Operasi-LO sebesar Rp 23.793.125.064,56,-dan Beban Transfer-LO sebesar Rp 0.

5.3.3 Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional

Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional per 31 Desember 2023 sebesar Rp (16.366.010.464,56,-)

5.4 Laporan Perubahan Ekuitas

5.4.1 Ekuitas Awal

Ekuitas awal sebesar Rp 23.041.445.154,95 merupakan ekuitas akhir tahun 2023.

5.4.2 Surplus/Defisit LO

Surplus/Defisit LO per 31 Desember 2023 sebesar Rp (16.366.010.464,56,-) merupakan selisih antara Pendapatan-LO dan Beban-LO selama periode pelaporan sampai dengan 31 Desember 2023.

5.2.3 Ekuitas Mutasi

Ekuitas Mutasi sebesar Rp (4.953.670.695,51)

5.2.4 Ekuitas Akhir

Ekuitas akhir sebesar Rp17.732.552.770,88 merupakan ekuitas akhir 31 Desember 2023

Yogyakarta, 31 Desember 2023
Kepala SKPD

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS PERHUBUNGAN

(AGUS ARIF NUGROHO, S.STP., M.Si)
NIP. 19770907 199603 1 001